

Kesiapan Masyarakat Kelurahan Rukun Lima Dan Paupanda Dalam Mengembangkan Pariwisata Pesisir

Oleh: Domitius Pau

Dosen Jurusan Ilmu Sosiatri STPM Santa Ursula Ende, Nusa Tenggara Timur

Abstract

This study aims to describe the readiness of coastal communities in Rukun Lima and Paupanda Villages, South Ende Regency, East Nusa Tenggara in developing coastal tourism. In the context of empowerment, readiness is related to initiative and awareness as well as the ability of the community to develop natural beaches into potential tourist destinations. This study used a qualitative descriptive approach by determining informants using the purposive sampling method. Data collection using interviews, documents, FGDs and observations. The research finding is that communities in Rukun Lima and Paupanda villages do not yet have the readiness and initiative to develop beach tourism. This is measured by knowledge of tourism and motivation as well as the ability to identify the tourism potential of the surrounding beaches. There are other reasons also found in the study, such as land ownership along the coast and poverty problems. Therefore, people in this region need to be empowered, especially to increase their capacity and ability to develop tourism potential in the region so that it becomes a potential source of income that can encourage family welfare.

Key Word: *Society, Tourism, Beach, Development, Coastal Community*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesiapan masyarakat pesisir di Kelurahan Rukun Lima dan Paupanda, Kabupaten Ende Selatan, Nusa Tenggara Timur dalam mengembangkan wisata pesisir. Dalam konteks pemberdayaan, kesiapan berkaitan dengan inisiatif dan kesadaran serta kemampuan masyarakat dalam mengembangkan pantai alami menjadi destinasi wisata yang potensial. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan penentuan informan menggunakan *metode purposive sampling*. Pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumen, FGD dan observasi. Temuan penelitian adalah bahwa masyarakat di Kelurahan Rukun Lima dan Paupanda belum memiliki kesiapan dan inisiatif untuk mengembangkan wisata pantai. Hal ini diukur dengan pengetahuan tentang pariwisata dan motivasi serta kemampuan untuk mengidentifikasi potensi wisata dari pantai sekitarnya. Ada alasan lain yang juga ditemukan dalam penelitian ini, seperti kepemilikan tanah di sepanjang pantai dan masalah kemiskinan. Oleh karena itu, masyarakat di kawasan ini perlu diberdayakan, terutama untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam mengembangkan potensi pariwisata di wilayah itu agar menjadi sumber pendapatan potensial yang mampu mendorong kesejahteraan keluarga.

Kata Kunci: Masyarakat, Pariwisata, Pengembangan, Masyarakat Pesisir,

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan industri yang berkembang sangat pesat dan memiliki prospek besar bagi pertumbuhan kesejahteraan di sejumlah negara saat ini. Menurut Baloch et al. (2023) bahwa Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) (UNWTO) 2017; Mikayilov et al. 2019) memproyeksikan pertumbuhan jumlah wisatawan akan mencapai 1,8 miliar pada tahun 2030. Pertumbuhan wisatawan seperti ini akan menjadi pendorong terhadap industri pariwisata yang berkelanjutan yang berpotensi terjadinya penciptaan nilai bersama (John & Supramaniam, 2024). Hal ini sudah dialami beberapa negara berkembang, di mana industri pariwisata sangat penting dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Balaguer & Jordá, 2002) (Durbarry, 2004) (Singh & Alam, 2024). Dengan demikian, sektor pariwisata berpotensi menjadi sumber pekerjaan vital bagi masyarakat Indonesia dan menjadi jalan keluar untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

Indonesia memiliki potensi pariwisata terbesar di dunia. Potensi alam dan warisan budaya yang kaya serta berbagai objek wisata tersebar di seluruh nusantara. Salah satu sektor pariwisata yang paling menjanjikan adalah wisata bahari. Apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya laut (Atmadja, 2022). Meskipun dihadapkan pada kendala pendanaan untuk pembangunan (Umar, 2022), namun sektor pariwisata dapat menjadi penggerak utama bagi perekonomian Indonesia di masa mendatang. Selain itu, sektor pariwisata juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam melalui pertambangan. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin global dalam industri pariwisata masa depan.

Pengembangan wisata pantai merupakan peluang baru bagi masyarakat di wilayah pesisir yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Menurut Astuti et al. (2020), Erapartiwi (2019, dan Guritno (2022) bahwa wisata pantai memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal. Oleh sebab itu, pengembangan wisata pantai berbasis masyarakat lokal akan memberikan banyak manfaat, terutama dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keindahan pantai dengan tidak membuang sampah dan limbah di sekitar area pantai.

Pengembangan wisata pantai berbasis masyarakat membutuhkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat lokal sekitar. Hal ini bahkan sangat krusial bagi pengembangan usaha pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing yang memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat sekitar (Iqbal et al., 2023; Pramanik & Rahman, 2023; Wismaningtyas et al., 2022). Oleh sebab itu, masyarakat yang terlibat di dalamnya dituntut untuk memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai tentang pariwisata, sehingga bisnis pariwisata tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang terlibat dimaksud.

Kemampuan masyarakat dalam mengelola pariwisata dapat diperoleh melalui upaya pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud dapat ditempuh melalui pelatihan keterampilan berbahasa Inggris, keterampilan kuliner, dan keterampilan dasar lainnya yang relevan dengan bisnis pariwisata. Pelatihan-pelatihan seperti ini akan membentuk masyarakat yang memiliki kesiapan untuk mengembangkan dan mengelola usaha pariwisata secara mandiri dan berkelanjutan. Seperti ditemukan dalam beberapa penelitian bahwa aspek pengetahuan tentang pariwisata merupakan faktor yang membangkitkan kesadaran dan inisiatif untuk mengembangkan berbagai peluang dan bisnis pariwisata (Bumyut et al., 2022; Huzain et al., 2022). Dengan demikian, masyarakat yang terlibat secara langsung akan mendapat manfaat dari upaya ini yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan.

Namun di sisi lain, perkembangan wisata pesisir di Indonesia umumnya masih dihadapkan pada masalah rendahnya kesiapan masyarakat pesisir dalam mengelola pantai yang tersedia. Kondisi seperti ini berimplikasi pada keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha pariwisata. Masyarakat yang tidak memiliki kapasitas tersebut akan menjadi subyek yang pasif, sehingga usaha pariwisata di sekitar tempat tinggalnya sendiri kurang memberikan manfaat terhadap perubahan ekonomi bagi keluarga

masyarakat sekitar. Hal ini semakin diperparah oleh situasi kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat pesisir sejak lama yang berdampak pada rendahnya kemampuan setiap keluarga untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi. Namun demikian, kondisi seperti ini dapat diatasi dengan upaya pemberdayaan secara berkelanjutan yang bersifat belajar sambil bekerja (*learning by doing*).

Beberapa penelitian sebelumnya juga telah membahas kesiapan masyarakat dalam pengembang pariwisata, antara lain menyoroti kesiapan stakeholder (A et al., 2016), Kesiapan Pelaku Pariwisata (Hapsari & Suminar, 2018), Kesiapan dari Aspek Transportasi (Wulandari et al., 2023), kesiapan dari aspek dukungan Pemerintah dan kohesivitas masyarakat (H&Margono, 2020), Kesiapan dari aspek pengembangan masyarakat dan kemitraan (S&Suminar, 2022, kesiapan dari aspek kelayakan fisik, aspek pasar dan pemasaran, aspek organisasi dan manajemen, aspek ekonomi dan aspek eksternal infrastruktur dan akomodasi (Karimah & Marsono, 2014), dan kesiapan dari aspek potensi (Amalia, 2014). Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada ruang yang dapat diisi melalui penelitian ini, yaitu kesiapan dari aspek motivasi, kesadaran, inisiatif dan kapasitas masyarakat lokal dalam mengembangkan wisata pantai.

Fenomena yang digambarkan di atas juga ditemukan di Desa Rukun Lima dan Paupanda, di mana masyarakat belum mampu mengelola pantai di kawasan tersebut untuk menjadi tempat wisata. Mayoritas orang di wilayah ini memiliki pendidikan menengah pertama dan hidup dari pekerjaan sebagai nelayan tradisional. Sementara para ibu dan remaja umumnya menjadi pengangguran tanpa pekerjaan. Sementara pantai di kawasan ini sangat strategis dan sangat layak untuk dikembangkan menjadi tempat wisata, namun hal itu sama sekali belum disadari oleh masyarakat setempat. Salah satu aspek yang menjadi kendala bagi masyarakat setempat adalah pengetahuan tentang bagaimana mengoptimalkan potensi wisata pantai di wilayah tersebut menjadi destinasi bernilai tinggi.

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan penting bagi para pengambil kebijakan, terutama dalam memberdayakan masyarakat di desa untuk memiliki kesadaran dan inisiatif untuk mengembangkan wisata pantai. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pra-kondisi bagi para peneliti atau pihak-pihak tertentu yang ingin melakukan aksi nyata berupa pendampingan kepada masyarakat di daerah-daerah pesisir yang berpotensi menjadi destinasi pariwisata. Dengan demikian masyarakat pesisir dan di Desa Rukun Lima dan Paupanda menjadi lebih siap menata potensi yang tersedia itu menjadi produk yang bernilai jual untuk memperbaiki kondisi ekonomi demi kehidupan rumah tangga yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan ditentukan secara *purposive*, terdiri dari unsur pemerintah desa, RT, masyarakat, dan tokoh agama. Data dikumpulkan melalui wawancara, FGD, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menyalin, memilah menurut tema, mensintesis, mencari pola, menemukan tema penting untuk dipelajari, dan menyimpulkan (Bogdan & Biklen, 2007). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rukun Lima dan Desa Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende selama 30 hari dengan pendanaan dari Sekolah Tinggi Pengembangan Masyarakat Santa Ursula.

PEMBAHASAN

Rukun Lima dan Paupanda adalah dua kelurahan yang berbatasan langsung dan terletak di Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur. Jumlah penduduk di kedua desa tersebut sebanyak 11.221 jiwa dan 66,6 persen di antaranya bermukim di daerah pesisir. Mayoritas penduduk di daerah pesisir beragama Muslim dan umumnya memiliki pendidikan menengah pertama dengan pekerjaan pokok sebagai nelayan gurem.

Berdasarkan hasil wawancara dan FGD, sebagian besar masyarakat pesisir di Desa Rukun Lima dan Paupanda merupakan masyarakat nelayan tradisional dengan pendapatan yang relatif rendah. Kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan yang baik dan berkualitas atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sangat terbatas. Masyarakat juga memiliki keterbatasan dalam mengakses berbagai sumber informasi dan pengetahuan, termasuk tentang pariwisata. Pelatihan keterampilan atau *capacity building* dalam bentuk apapun yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan, termasuk terkait wisata pantai sama sekali belum diperoleh dari institusi manapun.

Dari hasil pengamatan ditemukan bahwa masyarakat di sekitar pantai justru membuang sampah dan limbah ke area pantai. Kondisi pantai menjadi sangat kotor dan pantai menjadi kehilangan daya tariknya, meski hanya untuk sekedar bermain. Beberapa orang cenderung membuang hajat di pantai itu saat malam hari. Semua temuan ini menggambarkan bahwa masyarakat di Kecamatan Rukun Lima dan Paupanda belum siap untuk mengembangkan pantai menjadi tempat wisata, baik dari segi kapasitas pengetahuan dan keterampilan maupun dari segi inisiatif dan motivasi.

Diskusi

Kesiapan masyarakat merupakan faktor krusial dalam mendukung keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan pariwisata pesisir. Untuk mencapai hal tersebut, ada dua aspek yang diukur sebagai kesiapan, yaitu kemampuan dan kemauan/motivasi masyarakat. Kedua aspek ini sangat krusial dalam bisnis pariwisata. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai upaya intervensi, terutama melalui pemberdayaan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat pesisir tersebut. Melalui upaya pemberdayaan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, komitmen di kalangan masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada di daerahnya sendiri. Proses pemberdayaan berperan sangat penting dalam meningkatkan kemampuan individu untuk mendapatkan kontrol atas lingkungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan diri dan masyarakat, termasuk menciptakan kesetaraan bagi masyarakat rentan (Boyadjieva & Trichkova, 2023; Dan, 2020; Edison et al., 2022; Nair & Hamzah, 2015). Hal ini membutuhkan dukungan dari Pemerintah, terutama kebijakan yang memungkinkan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemberdayaan tersebut. Kebijakan seperti itu memiliki implikasi terhadap anggaran pemberdayaan yang tentu menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah di daerah kabupaten sampai di kelurahan.

Pengembangan pariwisata di beberapa negara terbukti dapat mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan daya tarik dan kesadaran masyarakat akan potensi pariwisata, yang dapat dipromosikan sebagai alat pengentasan kemiskinan yang cukup efektif (Folarin & Adeniyi, 2019). Demikian halnya dengan pengembangan pariwisata di Indonesia dan wilayah pesisir khususnya dapat menjadi alat pengentasan kemiskinan dimaksud. Dengan meningkatkan pengetahuan terkait pariwisata, kesadaran tentang potensi dan manfaat pariwisata, antusiasme dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap sumber daya pariwisata (publik) sehingga semua pemangku kepentingan dapat berpartisipasi (Blackstock, 2005; Tasci et al., 2014). Pengalaman negara lain dapat menjadi rujukan bagi pemerintah Indonesia dalam memodifikasi kebijakan tentang pengembangan masyarakat miskin di berbagai daerah melalui bisnis pariwisata. Hal ini juga perlu didukung dengan kebijakan yang membatasi para pejabat di daerah yang selama ini menjadi pelaku bisnis pariwisata sehingga mempersempit ruang bagi masyarakat lokal dalam memanfaatkan potensi untuk segera keluar dari kemiskinan.

Pengembangan pariwisata pesisir dapat menggunakan pola pariwisata berbasis masyarakat. Pariwisata berbasis masyarakat terbukti mampu memberikan kontribusi pendapatan bagi penduduk lokal, diversifikasi ekonomi lokal, melestarikan budaya, melestarikan lingkungan dan memberikan kesempatan pendidikan (Nair dan Hamzah, 2015), meningkatkan rasa kebersamaan dan semangat kemasyarakatan serta kepercayaan diri secara umum (Boley et al., 2015; Dan, 2020; Stern & Dillman, 2006). Pola seperti ini dapat meningkatkan nilai manfaat dari bisnis pariwisata dan memberi dampak positif terhadap terciptanya pariwisata yang berkelanjutan. Menurut Schönher (2023) bahwa

pariwisata berkelanjutan adalah model pariwisata yang bertanggung jawab, terutama pariwisata yang mengandung unsur regeneratif, ekowisata, pariwisata rendah karbon, atau pariwisata etis.

Pariwisata yang dikembangkan di wilayah pesisir diharapkan disesuaikan dengan konteks alam dan masyarakat di wilayah setempat. Masyarakat pesisir yang selama ini sudah menyatu dengan alam dan melindungi lingkungan dapat didorong agar meningkatkan praktek baik tersebut menjadi salah satu gagasan penting yang menarik para wisatawan, terutama yang ingin mendalami praktek hidup selaras alam. Dengan demikian, masyarakat lokal akan lebih cepat untuk menemukan rasa percaya diri yang berpengaruh terhadap pengembangan kreativitas dan inovasi yang bersumber dari kearifan lokal miliknya.

Kapasitas Masyarakat Pesisir dalam Mengembangkan Wisata Pesisir

Pengetahuan adalah salah satu elemen kapasitas yang mengacu pada segala sesuatu yang diketahui mengenai hal tertentu (*KKBI Daring IV*, tt). Pengetahuan masyarakat dalam penelitian ini difokuskan pada pemahaman masyarakat terkait pengelolaan pariwisata pantai menjadi tempat wisata. Dalam hal ini, pengetahuan masyarakat pesisir tentang wisata pantai menjadi sangat krusial bahkan berimplikasi langsung pada kemampuan mengidentifikasi dan menginisiasi pengembangan pantai menjadi objek wisata yang menarik dan bernilai jual tinggi.

Di pihak lain, masyarakat yang memiliki kapasitas terbatas tentu tidak mampu mengembangkan wisata pantai. Terutama masyarakat yang berpendidikan rendah dan miskin cenderung memiliki keterbatasan akses terhadap sumber informasi dan pengetahuan, sehingga wawasan dan pengetahuan tentang pengembangan wisata pantai pun relatif terbatas. Kondisi seperti ini dialami oleh sebagian masyarakat pesisir di Desa Rukun Lima dan Desa Paupanda. Masyarakat di wilayah desa tidak mampu mengakses pendidikan tinggi karena miskin. Dengan demikian, pengetahuan dan wawasan tentang pengembangan potensi pun menjadi sangat minim.

Kondisi pendidikan masyarakat Desa Rukun Lima dan Paupanda yang relatif rendah mempengaruhi kesiapan dan kemampuan mereka dalam mengembangkan wisata pantai. Masyarakat lokal tidak memiliki inisiatif maupun motivasi untuk mengembangkan pantai di kawasan itu agar menjadi tujuan wisata berbasis masyarakat. Padahal, pengembangan wisata pantai yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat dapat menciptakan kondisi untuk kesetaraan (*de-marginalisasi*) (Bellato & Cheer, 2021; Garjan et al., 2023). Hal ini tidak dipahami oleh masyarakat setempat karena keterbatasan kapasitas dan pengetahuan.

Masyarakat yang terlibat langsung atau subjek aktif dalam kegiatan pariwisata membutuhkan pengetahuan yang mumpuni (Abdullah et al., 2022). Dalam hal ini, pengembangan pariwisata perlu didukung oleh kapasitas dan kemampuan masyarakat sebab masyarakat tersebut menjadi subjek utama untuk menentukan pembangunan bisnis yang berkelanjutan. Sementara masyarakat di Desa Rukun Lima dan Paupanda belum mendapatkan pelatihan keterampilan atau kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan tentang wisata pantai. Hal ini sangat berimplikasi pada eksistensi masyarakat ketika pengembangan wisata pantai di wilayah tersebut dilakukan. Implikasi lain pun akan muncul, dimana masyarakat setempat justru menjadi individu yang pasif karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang wisata pantai. Hal ini merupakan tantangan bagi masyarakat hampir di semua wilayah pesisir yang selama ini berjuang untuk keluar dari situasi kemiskinan.

Dalam konteks pembangunan sosial, salah satu upaya penurunan kemiskinan antar masyarakat atau wilayah ditempuh melalui mekanisme penguatan kapasitas masyarakat. Melalui pemberdayaan, masyarakat didorong untuk berpartisipasi, mengembangkan kreativitas, dan inisiatif untuk membangun kemandirian (Suyatno, 2003). Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat pesisir di wilayah tersebut umumnya memiliki kapasitas sumber daya manusia yang terbatas dan tidak pernah dilibatkan dalam berbagai upaya pemberdayaan. Kapasitas yang terbatas seperti ini mempengaruhi cara pandang mereka terhadap pantai yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak

mendatangkan manfaat. Masyarakat setempat sering membuang sampah atau hajat di pantai itu saat malam tiba. Fakta ini diperkuat dengan hasil pengamatan bahwa sampah dan kotoran manusia berserakan di pantai. Kondisi seperti ini merupakan gambaran bahwa masyarakat di wilayah itu belum memiliki kreativitas untuk mengelola potensi, sehingga membutuhkan upaya-upaya pemberdayaan.

Salah satu faktor pemicu kesiapan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata pantai adalah terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan pantai dan mengelolanya menjadi tempat yang nyaman untuk pariwisata. Masyarakat pesisir yang memiliki kapasitas yang terbatas akan memberikan efek domino yang signifikan terhadap kehidupan sosial yang lebih luas. Di sisi lain, masyarakat yang terus terjebak dalam kemiskinan yang berkelanjutan di tengah melimpahnya sumber daya dapat membentuk cara pandang baru terhadap kemiskinan bahwa kondisi demikian adalah wajar. Dalam konteks ini, kemiskinan adalah akar penyebab yang menghalangi orang mengakses pendidikan berkualitas dan memiliki inisiatif untuk keluar dari kemiskinan. Seperti dikatakan Soetomo (2011) bahwa masyarakat yang memiliki inisiatif tinggi akan mencapai kemajuan lebih cepat, sedangkan masyarakat dengan inisiatif rendah akan tertinggal karena dinamika perkembangan masyarakat seperti itu cenderung 'menunggu perintah' atau lebih bergantung pada pihak-pihak tertentu.

Dalam konteks Desa Rukun Lima dan Desa Paupanda, masyarakat belum memiliki inisiatif untuk mengembangkan pantai menjadi destinasi wisata. Secara historis, masyarakat di kedua desa tersebut merupakan masyarakat agraris yang mengalami transisi mata pencaharian yang sebelumnya bertani. Setelah hilangnya lahan pertanian akibat ekspansi perkotaan dan pemukiman masyarakat tersebut pun bergantung sepenuhnya pada hasil tangkapan para suami. Kondisi seperti ini sangat mempengaruhi kemampuan dan inisiatif masyarakat tersebut untuk mengelola potensi pantai menjadi tempat wisata sebab dipandang sebagai hal yang baru. Hal ini setidaknya menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat lokal tidak memiliki kreativitas untuk mengembangkan wisata pantai dan cenderung bergantung pada kemurahan alam (memancing) atau mengharapkan bantuan beras raskin dari pemerintah.

Sebagian masyarakat Indonesia umumnya tidak mengetahui bahwa pariwisata kini merupakan salah satu industri gaya baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cepat, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup, selain mengaktifkan sektor produksi lain di negara penerima wisata (Wahab, 1992). Hal ini juga menjadi temuan dalam penelitian ini. Masyarakat di wilayah Rukun Lima dan Paupanda masih menganggap bahwa pantai adalah tempat alami untuk bercanda di siang hari bagi anak-anak atau tempat bagi nelayan sederhana untuk menambatkan perahu tradisional. Pandangan ini tercermin dari sikap sebagian masyarakat di kawasan tersebut yang masih membuang sampah dan sampah rumah tangga atau kotoran lainnya ke area pantai pada malam hari. Hal ini menyebabkan potensi pantai menjadi sangat kotor dan kehilangan daya tariknya. Sikap ini merupakan gambaran kesadaran masyarakat akan keberadaan pantai sebagai potensi industri gaya baru yang masih sangat minim.

Berdasarkan pembahasan temuan terkait kapasitas, kemampuan, dan sumber daya masyarakat dalam pengembangan wisata pantai di Desa Rukun Lima dan Desa Paupanda, dapat dipahami bahwa masyarakat di Desa Rukun Lima dan Desa Paupanda umumnya memiliki kapasitas dan kemampuan yang rendah, terutama pengetahuan tentang wisata pantai. Kondisi sumber daya manusia seperti ini sangat berpengaruh langsung terhadap kesiapan masyarakat di kawasan itu untuk menginisiasi pengembangan pantai menjadi destinasi wisata pantai yang potensial dan menarik dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga. Hal ini setidaknya menjadi tantangan bagi masyarakat miskin di daerah pesisir pada umumnya dalam mengidentifikasi, mengelola, dan memanfaatkan potensi alam, jika pemberdayaan tidak dilakukan. Pantai yang alami dan eksotis di kawasan ini sewaktu-waktu tidak dapat menjadi sumber pendapatan baru yang memungkinkan percepatan peningkatan pendapatan masyarakat untuk cepat keluar dari kemiskinan jika tidak ada upaya pemberdayaan dari pemerintah

dan pihak lain yang memiliki komitmen untuk melakukannya. Padahal, pendampingan masyarakat pesisir berkelanjutan memberikan manfaat dalam penerapan konsep ekonomi biru, yang bertujuan untuk meningkatkan solidaritas antar masyarakat dan memperkuat kesadaran terhadap lingkungan dan budaya lokal (Hidayat et al., 2023).

Motivasi Masyarakat Pesisir dalam Mengembangkan Wisata Pesisir

Munculnya motivasi, kesadaran, dan inisiatif masyarakat dalam konteks pemberdayaan seringkali ditentukan oleh hubungan antar masyarakat itu sendiri. Dalam masyarakat yang heterogen, sering terjadi kegagalan dalam interaksi sosial, termasuk dalam menginisiasi pengembangan berbagai potensi karena arogansi antar kelompok terkadang menyebabkan polarisasi yang berkepanjangan. Bahkan, tidak jarang kegagalan interaksi menimbulkan ketidakpercayaan dan permusuhan antar kelompok dalam masyarakat dan tidak jarang menimbulkan konflik (Satria, 2015). Secara anatomis, konflik dalam masyarakat pesisir dapat dikategorikan berdasarkan faktor penyebab, antara lain konflik kelas, konflik orientasi, konflik agraria, dan konflik primordial. Oleh karena itu, sebelum kegiatan pemberdayaan dilaksanakan, adalah untuk menyamakan orientasi tentang konteks pemberdayaan yang akan dilakukan sehingga semua pihak dapat menerima keberagaman di dalamnya (Soetomo, 2011).

Berdasarkan hasil wawancara dan FGD bahwa terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat di daerah. Bagi pemerintah, potensi pantai merupakan kawasan hijau yang tidak bisa diakses masyarakat, termasuk mengembangkan pariwisata. Di sisi masyarakat, pantai di daerah tersebut adalah tempat hidup mereka, sehingga layak untuk dikembangkan seperti pantai Ria, pantai lain di kelurahan lain dalam wilayah Kecamatan Ende Selatan. Dalam FGD tersebut juga terdapat pernyataan sebagian masyarakat yang keberatan dengan pengembangan wisata pantai, terutama warga yang tinggal di sepanjang tepi pantai karena merasa terancam direlokasi ke tempat lain. Meskipun semuanya beragama Islam, secara genealogis masyarakat di daerah pesisir cukup heterogen.

Berhubungan dengan konsep yang diungkapkan oleh Satria dan Sutomo di atas, temuan ini dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan orientasi mengenai pengelolaan pesisir di antara masyarakat itu sendiri maupun antara masyarakat dan pemerintah di wilayah tersebut. Hal ini juga dapat dianalisis sebagai konflik laten terkait kepemilikan pantai, yang setidaknya sangat mempengaruhi inisiatif dan motivasi masyarakat, baik secara individu maupun masyarakat secara kolektif dalam mengembangkan potensi wisata pantai di wilayah tersebut. Perbedaan orientasi tersebut semakin menimbulkan pandangan skeptis di kalangan masyarakat pesisir terhadap keberadaan pantai, yang kemudian mereproduksi sikap negatif, yaitu membuang sampah sembarangan di pantai. Situasi ini setidaknya menyebabkan motivasi dan kesadaran masyarakat untuk mengembangkan wisata pantai di wilayah tersebut menjadi sangat rendah.

Motivasi juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang. Orang yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah umumnya kurang kreativitas dan motivasi rendah, terutama motivasi untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi. Menurut studi Glaesser (2022), masyarakat yang kurang pendidikan dan pengetahuan relatif miskin. Orang-orang dalam kelompok itu lebih sulit dan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi peluang dan potensi, sehingga mereka tidak dapat menyelesaikan berbagai masalah yang mereka hadapi setiap hari. Ini bisa disebut lingkaran setan yang mencegah orang miskin keluar dari situasi miskin untuk mencapai kemakmuran.

Sebaliknya, orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mumpuni lebih mudah mengidentifikasi berbagai potensi dan peluang. Menurut Purwowibowo et al. (2018) bahwa pengetahuan dan keterampilan sangat linier dengan kemampuan masyarakat untuk menciptakan peluang dan mengatasi hambatan. Dalam konteks masyarakat di Kelurahan Rukun Lima dan Paupanda yang relatif kurang berpendidikan, mereka akan kesulitan dalam mengidentifikasi potensi wisata pantai di daerah tersebut, termasuk tidak mampu menyelesaikan masalah perbedaan pandangan kepemilikan

pantai dengan pemerintah. Ini adalah kondisi yang bermasalah dan dapat menjadi penyebab kemiskinan berkelanjutan jika langkah-langkah pemberdayaan tidak diambil.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir di Kelurahan Rukun Lima dan Paupanda diperlukan kerjasama lintas sektoral, antara pemerintah, masyarakat dan otoritas lokal (tokoh agama). Kemudian langkah pemberdayaan yang dilakukan adalah memberdayakan dengan menyelenggarakan pelatihan bagi ibu rumah tangga dan kaum muda di kawasan itu, khususnya keterampilan yang berkaitan dengan bisnis pariwisata. Melalui pelatihan dan penguatan kapasitas keterampilan, masyarakat dapat memanfaatkan potensi wisata pantai untuk menjadi tujuan yang menarik bagi pengunjung lokal maupun dari luar Kabupaten Ende. Hal ini sangat penting untuk menyelesaikan masalah sosial di daerah itu, terutama pengangguran dan kemiskinan karena hal itu dapat memicu berbagai masalah sosial yang tidak terduga.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi tentang kesiapan masyarakat dalam menginisiasi pengembangan pariwisata di Desa Rukun Lima dan Paupanda disimpulkan bahwa masyarakat di daerah tersebut belum memiliki kesiapan, baik dari segi kemampuan atau kapasitas maupun dari aspek motivasi atau kemauan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan rendahnya kesiapan masyarakat, yaitu: 1) faktor kemiskinan masyarakat di desa Rukun Lima dan Paupanda yang menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mengakses sumber pengetahuan dan informasi; 2) Pengetahuan masyarakat tentang wisata pantai masih sangat minim. Ini adalah dampak lebih lanjut dari rendahnya tingkat pendidikan kebanyakan orang di wilayah itu. Faktor kemiskinan juga merupakan penyebab lain bagi masyarakat kurang mampu untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi dan berkualitas; 3) Motivasi dan inisiatif masyarakat dalam mengembangkan pantai menjadi objek wisata sangat rendah. Masih ada perbedaan pandangan tentang status kepemilikan lahan di wilayah pesisir. Kondisi ini menyebabkan masyarakat menjadi skeptis terhadap pantai dengan membuang sampah dan berbagai jenis sampah rumah tangga, sehingga pantai kehilangan daya tariknya; 4) Belum ada upaya pemberdayaan atau pendampingan masyarakat untuk membangkitkan motivasi dan inisiatif dalam mengembangkan wisata pantai di wilayah tersebut. Hal ini penting sekaligus menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan sampah yang terus menjadi benang kusut di Kabupaten Ende.

Berdasarkan temuan penelitian ini, maka direkomendasikan bahwa pemberdayaan kepada masyarakat di wilayah-wilayah yang menjadi destinasi pariwisata menjadi sangat krusial. Demikian pula dengan kebijakan tentang pengembangan masyarakat pesisir harus lebih holistik yang melibatkan para akademisi dan stakeholder di wilayah setempat. Pemberdayaan dan kebijakan dimaksud sangat penting sekaligus untuk meminimalisasi kemungkinan penguasaan wilayah bisnis oleh masyarakat dari luar wilayah yang dapat berpotensi timbulnya berbagai konflik horisontal. Oleh sebab itu, kebijakan tentang pengembangan pariwisata sangat dibutuhkan saat ini agar masyarakat lokal dapat berpartisipasi dalam kegiatan itu. Masyarakat lokal harus menjadi subyek aktif dalam bisnis pariwisata di wilayahnya sendiri sebab bukan tidak mungkin kemiskinan masyarakat setempat dapat dieksploitasi menjadi obyek pariwisata kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- A, M. R., Fahmi Prihantoro M.A, S. S., & Yulita Kusumasari M.Sc, S. T. (2016). *Analisis Kesiapan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) pada Rencana Pengembangan Boom Marina di Kabupaten Banyuwangi sebagai Dermaga Kapal Wisata dalam Tinjauan Pariwisata Berkelanjutan* . S1 PARIWISATA Universitas Gadjah Mada
https://ugm.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwIR1dS8NA7Nj0RXxRV PzmHIVY7XrdWF_nHMKYDBn48VJybVpuW29jteyn

- fdMzonDJ30qJOn1muQuuSRNhVCB5zd-7QkqVEkz02mz026RTiVBxJ21yPgkrRZGLpLxOILDN_UyDoc10fn-NAbfU4-D56XhILNX5QU_hsREZ33k-jCw61rL24gbw9dFXblsbd97ZG
- Abdullah, T., Lee, C., & Carr, N. (2022). Conceptualising human and non-human marginalisation in tourism. *Tourism and Hospitality Research*, 23(2), 254–268. <https://doi.org/10.1177/14673584221089735>
- Amalia, G. (2014). Analisis Potensi Pengembangan Obyek Wisata Pantai Di Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.
- Astuti, W., Manan, A., & Ma'ruf, A. (2020). Economic Life of Coastal Communities: A Study of Meleura Coastal tourism Objects. *Journal La Lifesci*, 1(2), 17–22. <https://doi.org/10.37899/journallalifesci.v1i2.100>
- Atmadja, I. D. G. (2022). Indonesian Marine Resources Law Perspective of Marine Tourism Development. *Journal Equity of Law and Governance*, 2(2), 103–110. <https://doi.org/10.55637/elg.2.2.5766.103-110>
- Balaguer, J., & Cantavella-Jordá, M. (2002). Tourism as a long-run economic growth factor: The Spanish case. *Applied Economics*, 34(7), 877–884. <https://doi.org/10.1080/00036840110058923>
- Baloch, Q. B., Shah, S. N., Iqbal, N., Sheeraz, M., Asadullah, M., Mahar, S., & Khan, A. U. (2023). Impact of tourism development upon environmental sustainability: a suggested framework for sustainable ecotourism. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(3), 5917–5930. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-22496-w>
- Bellato, L., & Cheer, J. M. (2021). Inclusive and regenerative urban tourism: capacity development perspectives. *International Journal of Tourism Cities*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:237839235>
- Boley, B. B., Maruyama, N., & Woosnam, K. M. (2015). Measuring empowerment in an eastern context: Findings from Japan. *Tourism Management*, 50, 112–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.01.011>
- Boyadjieva, P., & Ilieva-Trichkova, P. (2023). *Empowerment Through Lifelong Learning BT - Third International Handbook of Lifelong Learning* (K. Evans, W. O. Lee, J. Markowitsch, & M. Zukas (Eds.); pp. 139–161). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-19592-1_8
- Bumyut, A., Thanapop, S., & Suwankhong, D. (2022). Exploring Readiness towards Effective Implementation of Safety and Health Measures for COVID-19 Prevention in Nakhon-Si-Thammarat Community-Based Tourism of Southern Thailand. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(16). <https://doi.org/10.3390/ijerph191610049>
- Dan, B. (2020). Disability and empowerment. *Developmental Medicine and Child Neurology*, 62(5), 536. <https://doi.org/10.1111/dmcn.14511>
- Durbarray, R. (2004). Tourism and economic growth: The case of Mauritius. *Tourism Economics*, 10(4), 389–401. <https://doi.org/10.5367/0000000042430962>
- Edison, E., Sri, R., & Asti, R. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Di Situ Cisanti Kelurahan (Community Empowerment At Situ Cisanti)*, 7, 200–207. <https://doi.org/10.32659/tsj.v7i2.180>
- Erapartiwi, K. O. (2019). Poverty Reduction in Coastal Community Area through Marine Tourism Development: A Case Study of Pemuteran Village. *Journal of Business on Hospitality and Tourism*, 5(1), 76. <https://doi.org/10.22334/jbhost.v5i1.151>
- Folarin, O., & Adeniyi, O. (2019). Does Tourism Reduce Poverty in Sub-Saharan African Countries? *Journal of Travel Research*, 59(1), 140–155. <https://doi.org/10.1177/0047287518821736>
- Glaesser, J. (2022). Relative educational poverty: conceptual and empirical issues. *Quality and Quantity*, 56(4), 2803–2820. <https://doi.org/10.1007/s11135-021-01226-3>
- Guritno, B. (2022). Tourism sectors contribution on the poverty reduction within tourism scope in

- Central Java. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(3), 664. <https://doi.org/10.29210/020221512>
- H, N. I., & Dr. Subando Agus Margono, M. S. (2020). *Pengelolaan Pariwisata Berbasis Komunitas Lokal (Cbt) Di Pantai Nglambor, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Diy*. Magister Manajemen Dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada. https://ugm.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwlv3NT8MgFCdOL8aLRo3f4ahxqxu4uR3pyirpZ1qaOS9NS-myw-pB_RP8v31UExdvO5HA4-PBe8CPxwOEKLH6vX9zgjLYVoG8IKBOA03UoOxTqvV4rEgxGhn350VMg1f6Ih-DjZ_-9EdlmcPz95UxOVufy7WpBoYJslL4298OK5veu5QMAj8mQdlCHtubamRwa5W
- Hapsari, D. F., & Ratna Eka Suminar M.Sc, S. T. (2018). *Kesiapan Kawasan Senggigi dan Tiga Gili dalam Menunjang Pengembangan Pulau Lombok sebagai Destinasi Wisata Halal*. S1 Perencanaan Wilayah Dan Kota Universitas Gadjah Mada. https://ugm.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwIR1dS8QwrHj6Ir4oKn7Td7l5W-v19qzOg3MycODHy8i2rlS3TjDv2-yEzx8u6e0JLRN-pE2CSljIvAm439nQjGZFFVKVWIZDwrRKVT6IHHUbjUQTQJaC10TEB-IlffHKz1_6q_TIE5Zcj17vWmoG5wmfOtrig8D9xtreeVfKxmqrERuJwV0beY-kLkyzoi6iXb
- Hidayat, M. S., Yasin, A., Sulistiowati, R., Regina, D., & Nugrahanti, T. P. (2023). Green Economy Initiatives in Enhancing Social Solidarity in the Tourism Sector in Coastal Areas. *International Journal of Science and Society*, 5(1), 232–243. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v5i1.652>
- Huzain, A. F., Saifudin, W., & Ahmad, N. Y. (2022). Community Readiness in the Implementation of Local Tourism Village in Alas Sumur Bondowoso. *Proceedings of the 3rd International Media Conference 2021 (IMC 2021)*, 672(Imc 2021), 213–218. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220705.022>
- Iqbal, A., Ramachandran, S., May Ling, S., Subramaniam, T., & Latiff, K. (2023). Insights into the Role of Community Participation as a Tool for Local Support: A Normative Model for Competitive and Sustainable Destination Development. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(1), 807–816. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i1/15600>
- John, S. P., & Supramaniam, S. (2024). Value co-creation research in tourism and hospitality management: A systematic literature review. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 58, 96–114. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2023.11.008>
- Karimah, A., & Prof. Dr. Marsono, S. U. (2014). *Analisis Kelayakan Pengembangan Wisata Budaya Di Dusun Tutup Ngisor Dalam Perspektif Pariwisata Berkelanjutan*. Pariwisata Universitas Gadjah Mada. https://ugm.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwlvw7T8MwED61sCAWECDe8ozU0DQhxaNLkmKSmChxBGWJmsauOiQMwP_nHKiomGCyLPvOvvPjO9_ZBnBG1nDwa0-48ajSCAWaurSmC2dY0UU19tw52g-u8sxb5VnqJC_Os3STHtyun8ao99oyzvO3lQk5Wx_LxjSDw4RnfWXuh83b77uW1x5F07wPfaeL1oaWMG
- KKBI Daring IV*. (n.d.). Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Nair, V., & Hamzah, A. (2015). Successful community-based tourism approaches for rural destinations. *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*, 7, 429–439. <https://doi.org/10.1108/WHATT-06-2015-0023>
- Pramanik, S. A. K., & Rahman, M. Z. (2023). Influences of Local Community Dimensions in Enhancing Support for Sustainable Tourism Development. *International Journal of Hospitality & Tourism Administration*, 0(0), 1–25. <https://doi.org/10.1080/15256480.2023.2169854>
- Purwowibowo, P., Hendrijanto, K., & Soelistijono, P. (2018). Peningkatan Kapasitas Manusia Sebagai Fokus dari People Centered Development. *ARISTO; Vol 6, No 2 (2018): July* DO -

- 10.24269/*Ars.V6i2.1068*. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/article/view/1068>
- Satria, A. (2015). *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Kerja sama antara Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=WCNLDAAAQBAJ>
- Schönherr, S. (2023). Tourism Actors' Responsible Behavior: A Systematic Literature Review. *Journal of Hospitality & Tourism Research*, 10963480231171330. <https://doi.org/10.1177/10963480231171330>
- Shokri Garjan, H., Paydar, M. M., & Divsalar, A. (2023). A sustainable supply chain for a wellness tourism center considering discount and quality of service. *Expert Syst. Appl.*, 211(C). <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.118682>
- Singh, D., & Alam, Q. (2024). Is tourism expansion the key to economic growth in India? An aggregate-level time series analysis. *Annals of Tourism Research Empirical Insights*, 5(2). <https://doi.org/10.1016/j.annale.2024.100126>
- Soetomo. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelaja.
- Stern, M. J., & Dillman, D. A. (2006). Community Participation, Social Ties, and Use of the Internet. *City & Community*, 5(4), 409–424. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6040.2006.00191.x>
- Suyatno, H. (2003). *Pengembangan masyarakat: dari pembangunan sampai pemberdayaan*. Aditya Media. <https://books.google.co.id/books?id=GtDsAAAAMAAJ>
- Umar, I. (2022). Evaluation of the suitability of marine tourism in the Mandeh Archipelago, West Sumatra. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 12(2), 259–267. <https://doi.org/10.29244/jpsl.12.2.259-267>
- Wahab, S. (1992). *Manajemen kepariwisataan / oleh Salah Wahab; alih bahasa Frans Gromang*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:179740234>
- Wismaningtyas, T. A., Mukti, A., Kurniasih, Y., Winata, R. A., Fadlurrahman, F., Suwitri, S., Mulyani, S., & Hendarto, H. (2022). Community Based Tourism Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kelurahan Ngargogondo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(4). <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i4.2525>
- Wulandari, A. Y. U. F., Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono M.Sc., Ph.D, M. U. P., & Isti Hidayati M.Sc., Ph.D, S. T. (2023). *Potensi dan Kesiapan Pengembangan Kawasan Perkotaan Kutoarjo sebagai Kawasan Transit Oriented Development (TOD)*. S1 Perencanaan Wilayah Dan Kota Universitas Gadjah Mada. https://ugm.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwIV1LS8QwEA4-LuJFUfFNjopsrUnptmfXIsi6PfQgXsqkSUuVJrDt4t93JitavO0pMBmSTF6TyXyTMCZFEE7-7QkiqWMDVTJMK6VFperYwBSkqpMp6Afjwe-5nL_LtyKaj37-MoMO6PK8b8nlHKYajqrBYUJb3xA-DOwP1vKelkYpjH1bendtFrySumi6kbrIDt

{Bibliography}